

Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Objek Wisata Saba Budaya Suku Baduy Desa Kanekes Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Endin Saprudin¹, Ika Sartika², M. Zubakhrum Tjenreng³, Ratu Diah Wulansari⁴

Institut Pemerintahan Dalam Negeri¹, Institut Pemerintahan Dalam Negeri², Institut Pemerintahan Dalam Negeri³, Universitas Setia Budi Rangkasbitung⁴

Email Korespondensi: endin.saprudin009@gmail.com, ika_sartika@ipdn.ac.id, tjenreng@gmail.com, ratudiahwulansari2@gmail.com

Abstrak: Desa Kanekes yang berada di Kabupaten Lebak memiliki potensi wisata saba budaya yang terkenal dengan upacara Seba dan Ngaseuk serta tata cara kehidupan suku Baduy yang unik ditunjang dengan keindahan alam yang masih natural. Setelah Desa Kanekes menjadi objek wisata, hal ini berdampak positif terhadap Baduy yang semakin banyak dikunjungi para wisatawan sehingga ekonomi masyarakat pun semakin meningkat, meski demikian banyak pula permasalahan-permasalahan yang timbul terutama ketika tamu yang datang seringkali melakukan pelanggaran adat setempat, dan berpengaruh bagi luntarnya budaya yang ada, banyaknya pemandu wisata dari luar Baduy yang kurang paham aturan adat setempat kerap menjadi persoalan sekaligus menjadi pesaing yang tidak seimbang bagi masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dengan melihat peran para stakeholders serta rencana tindak lanjut dalam pengembangan pariwisata. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif melalui observasi yang cukup intens dan wawancara dengan para informan kunci, akhirnya diperoleh hasil sebagai berikut: pengembangan pariwisata berbasis masyarakat belum optimal dilihat dari rendahnya dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat, penggunaan sumberdaya lokal, dan penguatan institusi lokal. Perlu adanya peningkatan pelatihan dan pendampingan yang khusus, memperketat aturan adat berikut sanksi, serta menyiapkan peraturan pendukung. Peran serta stakeholders juga belum berjalan dengan optimal. Belum terlihatnya pengembangan pariwisata yang diinisiasi oleh masyarakat dan terlibatnya swasta sebagai investor dengan skema yang jelas, dan peran pemerintah sebagai fasilitator sekaligus koordinator. Rencana tindak lanjut pengembangan pariwisata berbasis masyarakat belum menyentuh pada pembuatan peraturan pendukung dan peningkatan pelatihan serta pendampingan sehingga diperlukan adanya evaluasi master plan yang direncanakan, pemerintah sebagai manajer harus dapat menjadi koordinator dan kontroler untuk memastikan terjadinya pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

Kata kunci; Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat; Peran Stakeholders; Rencana Tindak Lanjut Pengembangan Pariwisata.

Abstract: Kanekes Village, which is located in Lebak Regency, has the potential for cultural tourism which is famous for its Seba and Ngaseuk ceremonies and unique Baduy tribe life procedures supported by natural beauty that is still natural. After Kanekes Village became a tourist attraction, this had a positive impact on Baduy which was increasingly visited by tourists so that the community's economy was increasing, however there were also many problems that arose, especially when guests who came often violated local customs, and affected the fading of the existing culture, the number of tour guides from outside Baduy who did not understand the local customary rules often became a problem as well as becoming a problem unbalanced competitors for the local community. This research aims to find out how to develop community-based tourism by looking at the role of stakeholders and follow-up plans in tourism development. By using qualitative-descriptive research methods through quite intense observation and interviews with key informants, the following results were finally obtained: the development of community-based tourism is not optimal in terms of low government support, community

participation, use of local resources, and strengthening of local institutions. There is a need to increase special training and mentoring, tighten customary rules and sanctions, and prepare supporting regulations. The participation of stakeholders has also not run optimally. There has been no tourism development initiated by the community and the involvement of the private sector as investors with a clear scheme, and the role of the government as a facilitator and coordinator. The follow-up plan for the development of community-based tourism has not touched on the making of supporting regulations and the improvement of training and mentoring so that there is a need for an evaluation of the planned master plan, the government as a manager must be able to be a coordinator and controller to ensure the development of sustainable community-based tourism.

Keywords: *Community-Based Tourism Development; Role of Stakeholders; Tourism Development Follow-up Plan.*

Article History:

Received; 01-10-2024; Revised; 22-11-2024; Accepted; 20-12-2024

PENDAHULUAN

Provinsi Banten memiliki potensi objek wisata yang kian besar. Pola pengembangan pariwisata Provinsi Banten berdasarkan peraturan daerah nomor 9 tahun 2005 dengan membangun tiga kawasan pariwisata yaitu: (1) wilayah pengembangan pariwisata (WPP) A terdiri dari Kab/Kota Tangerang, pantai utara, dan Kota Serang; (2) Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) B terdiri dari kota cilegon, Kab Serang, pantai barat, dan ujung kulon; (3) Wilayah pengembangan pariwisata (WPP) C terdiri dari Banten tengah dan Pantai Selatan. Banten merupakan Provinsi yang telah dicanangkan menjadi salah satu wilayah penyangga (*buffer*) antara pulau Jawa dan Sumatra dalam paradigma *Master Plan* Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 - 2025, memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Hal ini didukung pula dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2012 yang menetapkan Tanjung Lesung sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) selain Sei Mengkei dan Bitung.

Hal ini tentu saja sejalan dengan tema Koridor Ekonomi Pulau Jawa yang berperan sebagai pendukung industri dan jasa nasional. Pariwisata yang selalu diidentikkan dengan kegiatan perjalanan adalah suatu aktivitas sadar yang secara langsung maupun tidak langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pariwisata bisa sebagai konsumen jasa pariwisata maupun berperan menjadi produsen atau penyedia barang/jasa dalam kegiatan pariwisata. Masyarakat bersentuhan langsung dengan kegiatan pariwisata karena merupakan bagian dari lingkungan sosial-ekonomi yang melingkupi kegiatan pariwisata secara luas.

Dibalik perkembangan sektor pariwisata yang mengesankan tersebut, ada kekhawatiran terhadap pengembangan pariwisata, bahwa pariwisata adalah salah satu bentuk kapitalisme baru yang cenderung memeras masyarakat lokal (Damanik, 2013). Studi Dewi (2014) memperkuat pendapat tersebut bahwa pariwisata belum banyak memberikan manfaat terhadap masyarakat lokal, karena adanya kebocoran dalam sistem perekonomian masyarakat. Beberapa studi lain menunjukkan bahwa pariwisata telah berdampak negatif, yakni berupa semakin memburuknya ketimpangan antar daerah, kesenjangan pendapatan antar kelompok

masyarakat, hilangnya kontrol masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi, penurunan kualitas lingkungan alam, sosial, dan kebudayaan. Selain itu, maraknya ekspansi pariwisata dan intervensi modal asing di daerah-daerah dan wilayah pedesaan menyebabkan terjadinya proses marginalisasi posisi sosial ekonomi masyarakat lokal (Pitana dan Gayatri, 2005).

Di dalam menjawab berbagai kritik tersebut, konsep pengembangan pariwisata saat ini mencoba untuk meningkatkan peran aktif masyarakat sehingga mengurangi tingkat kebocoran ekonomi dan memberikan manfaat lebih banyak bagi masyarakat lokal. Dalam konteks ini, pengembangan pariwisata pedesaan dipandang cukup signifikan dilakukan.

Desa Kanekes yang berada di Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten adalah Desa yang seluruh masyarakatnya adalah suku Baduy. Desa Kanekes memiliki potensi wisata saba budaya yang terkenal dengan upacara *Seba* dan *Ngaseuk* serta tata cara kehidupan suku Baduy yang unik ditunjang dengan keindahan alam yang masih natural. Kehidupan mereka dari waktu ke waktu, generasi ke generasi penuh dengan kesederhanaan, ketaatan, keikhlasan, *kukuh pangukuh* dalam mempertahankan dan melaksanakan tradisi serta amanat leluhurnya. Ada tiga hal utama yang mewarnai keseharian mereka, yaitu sikap hidup sederhana, bersahabat dengan alam yang alami, dan spirit kemandirian.

Masyarakat suku Baduy Desa Kanekes secara umum terbagi menjadi tiga kelompok yaitu *tangtu*, *panamping*, dan *dangka* (Permana, 2001). Kelompok *tangtu* adalah kelompok yang dikenal sebagai Suku Baduy *Jero* (Baduy Dalam), kelompok masyarakat kedua yang disebut *panamping* adalah mereka yang dikenal sebagai Baduy Luar, dan kelompok Baduy *Dangka* tinggal di luar wilayah Desa Kanekes. Kampung *Dangka* tersebut berfungsi sebagai semacam *buffer zone* atas pengaruh dari luar (Permana, 2001).

Kepercayaan masyarakat Kanekes yang disebut sebagai ajaran Sunda Wiwitan, ajaran leluhur turun temurun yang berakar pada penghormatan kepada *karuhun* atau arwah leluhur dan pemujaan kepada roh kekuatan alam (animisme). Bentuk penghormatan kepada roh kekuatan alam ini diwujudkan melalui sikap menjaga dan melestarikan alam; yaitu merawat alam sekitar (gunung, bukit, lembah, hutan, kebun, mata air, sungai, dan segala ekosistem di dalamnya), serta memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada alam, dengan cara merawat dan menjaga hutan larangan sebagai bagian dalam upaya menjaga keseimbangan alam semesta. Inti kepercayaan tersebut ditunjukkan dengan adanya *pikukuh* atau ketentuan adat mutlak yang dianut dalam kehidupan sehari-hari orang Kanekes/ suku Baduy (Garna, 1993). Isi terpenting dari '*pikukuh*' (kepatuhan) Kanekes tersebut adalah konsep "tanpa perubahan apa pun", atau perubahan sesedikit mungkin: *Lojor heunteu beunang dipotong, pèndèk heunteu beunang disambung* (panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung).

Masyarakat suku Baduy mengenal dua sistem pemerintahan, yaitu sistem nasional, yang mengikuti aturan negara Indonesia, dan sistem adat yang mengikuti adat istiadat yang dipercaya masyarakat. Kedua sistem tersebut digabung atau diakulturasikan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi benturan. Secara nasional, masyarakat suku Baduy Desa Kanekes dipimpin oleh kepala desa yang disebut sebagai *jaro pamarentah*, yang ada di bawah camat,

sedangkan secara adat tunduk pada pimpinan adat suku Baduy Desa Kanekes yang tertinggi, yaitu "Pu'un".

Sebagaimana yang telah terjadi selama ratusan tahun, mata pencaharian utama masyarakat suku Baduy adalah bertani padi *huma*. Selain itu mereka juga mendapatkan penghasilan tambahan dari menjual buah-buahan yang mereka dapatkan di hutan seperti durian dan asam koranji, serta madu hutan. Di bidang pertanian, masyarakat suku Baduy Luar berinteraksi erat dengan masyarakat luar, misalnya dalam sewa-menyewa tanah, dan tenaga buruh.

Masyarakat suku Baduy yang sampai sekarang ini ketat mengikuti adat-istiadat bukan merupakan masyarakat terasing, terpencil, ataupun masyarakat yang terisolasi dari perkembangan dunia luar. Berdirinya Kesultanan Banten yang secara otomatis memasukkan Desa Kanekes ke dalam wilayah kekuasaannya tidak lepas dari kesadaran mereka. Sebagai tanda kepatuhan/pengakuan kepada penguasa, masyarakat suku Baduy secara rutin melaksanakan *seba* ke Kesultanan Banten (Garna, 1993). Sampai sekarang, upacara *seba* tersebut terus dilangsungkan setahun sekali, berupa menghantarkan hasil bumi (padi, palawija, buah-buahan) kepada Gubernur Banten (sebelumnya ke Gubernur Jawa Barat) melalui Bupati Kabupaten Lebak.

Kondisi alam yang indah, lestarynya adat istiadat masyarakat yang bersahaja, serta kondisi jalan perkampungan yang natural menuju Baduy Dalam (*baduy jero*) tanpa adanya pembangunan infrastruktur modern dan memang diinginkan masyarakat Baduy seperti itu, membuat perjalanan jelajah di berbagai kampung suku Baduy yang berada di Desa Kanekes yang terdiri dari 63 kampung lebih atraktif dan menarik wisatawan minat khusus. Bagi pecinta alam dan olah raga merupakan tantangan untuk ditaklukan, tidak hanya itu kunjungan wisatawan dalam bentuk rombongan atau *family gathering* menjadikan kunjungan ini sebagai wisata uji fisik, kesabaran, dan kebersamaan hingga menuju Baduy Dalam (*baduy jero*).

Sejak dijadikan sebagai kawasan objek wisata pada tahun 1992 oleh Pemerintah Kabupaten Lebak, Baduy semakin banyak dikunjungi para wisatawan, pengunjung yang datang ke Baduy diberlakukan tarif masuk hingga saat ini besaran tarif telah mencapai Rp. 5.000 /orang. Dengan penetapan tersebut pada dasarnya masyarakat suku Baduy merasa keberatan ketika daerahnya dijadikan sebagai kawasan objek wisata, karena menurut pemahamannya bahwa yang namanya wisata itu berarti negatif, wisata itu tempat hiburan, harus ada penginapan, tempat permainan, tempat untuk ramai-ramai dan itu tidak sesuai dengan aturan adat. Apalagi penetapan objek wisata tersebut tidak melalui musyawarah dengan para petinggi adat setempat, (Ayah Alim, wakil Puun Baduy).

Setelah Baduy dijadikan sebagai objek wisata, banyak permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh warga suku Baduy. Hal ini diketahui dengan banyaknya keluhan-keluhan dari warga suku Baduy terutama ketika tamu yang datang banyak melakukan pelanggaran adat setempat. Banyaknya pemandu wisata yang berasal dari luar suku Baduy kerap menjadi persoalan, banyak pemandu yang kurang begitu menghayati aturan-aturan adat setempat

sehingga seringkali tidak memberikan pengarahan kepada para pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarangan, berperilaku dan bertutur kata yang sopan.

Selain itu kedatangan wisatawan juga memengaruhi perilaku masyarakat suku Baduy khususnya anak-anak dan remaja. Perubahan yang tampak secara fisik adalah cara berpakaian mereka, sebagian anak kecil dan remaja di Baduy Luar, terutama pria, mulai memakai kaos yang bukan merupakan baju khas suku Baduy. Namun demikian berdampak positif pula terhadap peningkatan ekonomi mereka seperti banyaknya masyarakat suku Baduy yang membuka usaha warung kecil dengan berjualan segala macam yang merupakan baik hasil alam maupun hasil kerajinan mereka. Tidak hanya itu, masyarakat Baduy juga banyak yang menjadi *tourguide* dan *potter*, serta menyewakan rumah-rumah mereka untuk dijadikan tempat penginapan bagi para pengunjung yang datang.

Masyarakat suku Baduy yang unik karena di satu sisi mereka menutup diri untuk menghindari pengaruh luar demi menjaga warisan leluhur mereka, namun di sisi lain terjadi pula keserasian hubungan masyarakat suku Baduy dengan dunia luar sehingga Kurnia dan Sihabudin (2010: 10) mengatakan bahwa: "*Baduy itu tertutup tetapi terbuka, kaku tetapi fleksibel*".

Memang tidak mudah memadukan dua kepentingan yang berbeda antara Pemerintah yang ingin memajukan daerahnya dan keinginan masyarakat adat yang masih mengukuh adat dan tradisi, tapi justru disitulah tantangan Pemerintah Daerah dalam membangun dan memajukan daerahnya tanpa harus melawan adat dan tradisi masyarakatnya. Karena dalam membangun dan memajukan suatu daerah tidak harus menjadi kawasan industri, justru bagaimana Pemerintah dapat sebijak mungkin melihat potensi wilayah untuk dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal wilayah tersebut.

Diketahui bahwa kondisi infrastruktur jalan sebagai akses menuju wisata tersebut masih belum baik, rusak dan sempit. Kapasitas sumber daya manusia dan sadar wisata di masyarakat suku Baduy masih tergolong rendah tergambar dari kurangnya estetika keindahan dan kebersihan lingkungan, sebagaimana pengamatan peneliti masih banyak warga yang menyimpan jemuran di depan rumah, belum tersedianya toilet-toilet tradisional di sepanjang jalan wilayah objek wisata sebagai fasilitas umum bagi para wisatawan, dan belum tersedianya tempat pengelolaan sampah serta menyiapkan lahan tidak sekedar di buang melainkan harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi penumpukan sampah non organik yang dibawa wisatawan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis sejauh mana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di objek wisata saba budaya suku Baduy Desa Kanekes yang di dalamnya harus melibatkan peran berbagai pihak (*stakeholder*) serta bagaimana rencana tindak lanjut pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai pengelolaan pariwisata yang dilaksanakan untuk masyarakat dan rencana tindak lanjut pengembangan pariwisata di objek wisata saba budaya suku Baduy Desa Kanekes Kabupaten Lebak.

I. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengembangan Pariwisata

Pariwisata adalah serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau keluarga atau kelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan, (Cooper, 2000 dalam Budihatmojo, 2020 :112). Kunjungan yang dimaksud bersifat sementara dan pada waktunya akan kembali ke tempat tinggal semula, hal tersebut memiliki dua elemen yang penting, yaitu: perjalanan itu sendiri dan tinggal sementara di tempat tujuan dengan berbagai aktivitas wisatanya. Pengembangan dalam masyarakat pada umumnya terbagi menjadi dua yakni pengembangan orang dan pengembangan tempat. Dalam pengembangan pariwisata maka hendaknya berfokus pada kedua unsur ini, dimana pengembangan orang difokuskan pada pengembangan Sumber daya manusia dan pengembangan tempat berfokus pada pembangunan wisata yang berkelanjutan (Haryadi Santoso & Mollekandella Boer, n.d.).

Pengembangan pariwisata adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah secara teratur dan terorganisir melalui prosedur, arah, strategi dan program pembangunan yang telah disusun sesuai dengan rencana nasional agar selaras dengan target pembangunan nasional (Sutiarso & Susanto, 2018). Dalam Undang- undang Nomor 10 Tahun 2009 mengenai kepariwisataan menyebutkan bahwa pengembangan pariwisata dilaksanakan melalui perencanaan pengembangan pariwisata dengan melihat keunikan, keberagaman, sumber daya alam, kebutuhan sumber daya manusia dan sosial budaya untuk dijadikan objek wisata (Andri Puspita Darmawan, 2019).

2. Pariwisata Berbasis Masyarakat

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan sejenis kepariwisataan yang perkembangan dan pengelolaannya dikontrol oleh masyarakat lokal, dimana bagian terbesar dari manfaat yang dihasilkan kepariwisataan tersebut dinikmati oleh masyarakat lokal, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kepariwisataan tersebut, serta memberikan pendidikan bagi pengunjung maupun masyarakat lokal mengenai pentingnya usaha konservasi terhadap alam dan budaya, Hausler and Strasdas (2003 : 3). *Community Based Tourism* adalah model manajemen kepariwisataan yang dikelola oleh masyarakat setempat yang berupaya untuk meminimalkan dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan dan budaya dan pada saat yang sama menciptakan dampak ekonomi yang positif, Ernawati (2010). Masyarakat yang tinggal disekitar obyek dan daya tarik pariwisata, sesungguhnya adalah penduduk bagian dari atraksi wisata itu sendiri. Konsep CBT bermakna bahwa manajemen pariwisata ditempat bersangkutan dikelola oleh masyarakat setempat, ini meliputi pengelolaan kepariwisataan secara menyeluruh dilokasi tersebut, termasuk penyiapan semua produk/pelayanan yang dibutuhkan oleh wisatawan, dengan cara demikian memungkinkan untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan kepariwisataan untuk masyarakat setempat, serta menempatkan mereka sebagai subyek kegiatan kepariwisataan bukan sebagai obyek. CBT merupakan alat untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Menurut Suansri (2003), terdapat sepuluh prinsip dasar CBT yaitu :

- a) Mengakui, mendukung dan mengembangkan kepemilikan komunitas dalam industri

pariwisata

- b) Mengikutsertakan anggota, komunitas dalam memulai setiap aspek
- c) Mengembangkan kebanggaan komunitas
- d) Mengembangkan kualitas hidup komunitas
- e) Menjamin keberlanjutan lingkungan
- f) Mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area local
- g) Membantu berkembangnya pembelajaran tentang pertukaran budaya pada komunitas
- h) Menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia
- i) Mendistribusikan keuntungan secara adil pada anggota komunitas
- j) Berperan dalam menentukan prosentase pendapatan (pendistribusian pendapatan) dalam proyek yang ada di komunitas.

Sepuluh prinsip dasar tersebut harus menjadi tumpuan, arah dan prinsip dasar dari pembangunan pariwisata agar keberlanjutannya terjamin.

Beberapa kunci pengaturan pembangunan pariwisata dengan pendekatan CBT menurut Yaman & Mohd (2004) yaitu :

- a) Adanya dukungan pemerintah
- b) Partisipasi dari masyarakat
- c) Pembagian keuntungan yang adil
- d) Penggunaan sumber daya lokal secara berkesinambungan
- e) Penguatan institusi lokal

Satu hal yang sangat penting juga mengenai rencana penerapan pariwisata berbasis masyarakat menurut Asker et al adalah bahwa rencana tersebut harus terintegrasi dengan rencana pengembangan yang lebih luas di suatu daerah sehingga dukungan dari berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan. Dalam Peraturan Menteri (Permen) Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan bahwa untuk menciptakan orkestrasi dan memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, dan untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat kepariwisataan agar memberikan keuntungan, manfaat pada masyarakat dan lingkungan, maka diperlukan pendorong sistem kepariwisataan melalui optimasi peran *business* (Bisnis), *government* (Pemerintah), *community* (Komunitas), *academic* (Akademisi), and *media* (Publikasi) atau di singkat BGCAM agar terintegrasi dengan baik. Selanjutnya (Aribowo, 2019) mengatakan bahwa dalam menciptakan orkestrasi dan memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, menciptakan pengalaman serta nilai manfaat kepariwisataan demi memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungan sekitar, maka diperlukan pendorong sistem kepariwisataan melalui optimasi peran *business* (bisnis), *government* (pemerintah), *community* (komunitas), *academic* (akademisi), dan *media* (publikasi) atau BGCAM dan dikenal dengan konsep *pentahelix*. Menurut (Soemaryani, 2016) Model *pentahelix* merupakan referensi dalam pengembangan sinergitas antara instansi untuk mencapai tujuan. Menurut (Rampersad,

Quester, & Troshani, dalam Halibas, Sibyan, dan Maat, 2017) peran kolaborasi *pentahelix* memiliki tujuan inovasi dan berkontribusi terhadap kemajuan sosial ekonomi daerah.

Berikut gambar yang dapat mengilustrasikan pemangku kepentingan pariwisata dalam konsep *pentahelix* :

Gambar 2.1
Pemangku Kepentingan dalam Pariwisata (Konsep *Pentahelix*)



Sumber : Olahan Peneliti

Model kerjasama tersebut bertujuan untuk melakukan optimasi peran dari unsur Pemerintah, Bisnis, Komunitas, Akademisi, dan Media sebagai pendorong perubahan sosial yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Kerjasama antar *stakeholders* sebagai dasar untuk berkolaborasi dalam pengembangan dan perubahan sosial sangat memungkinkan untuk menciptakan keberlanjutan dari perubahan sosial yang diinginkan oleh masyarakat tersebut. Selain itu perubahan sosial tersebut juga dapat memberikan manfaat bagi publik secara luas, lingkungan sekitar, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sinergitas antar *stakeholders* tersebut dapat menjadi kunci dari keberlangsungan dan keberlanjutan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat serta perubahan sosial positif yang diinginkan oleh berbagai pihak. Tetapi dalam kenyataannya yang terjadi peran masyarakat masih sangat kecil bila dibandingkan dengan *stakeholder* lainnya. Penyebabnya adalah tidak adanya atau lemahnya akses yang mereka miliki kepada sumberdaya (*resources*) pariwisata yang ada dan rendahnya pelibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

II. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka desain penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2017 : 6) bahwa Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Data primer yang diperoleh adalah informasi secara faktual di lapangan (observasi) mengenai pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, yang diperoleh berdasarkan

implementasi teknik wawancara bersama key informan yang telah ditentukan. Sedangkan jenis data sekunder diperoleh dari informasi dalam dokumen peraturan atau kebijakan program pelaksanaan pengembangan pariwisata yang sedang direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak.

Analisis data dalam pengembangan pariwisata digunakan pendekatan 5 indikator pengembangan pariwisata berbasis masyarakat berdasarkan pendapat dari (Yaman, A.R. and Mohd, 2004) yaitu dukungan dari pemerintah, partisipasi masyarakat, pembagian keuntungan yang adil, penggunaan sumber daya lokal secara berkesinambungan, dan penguatan institusi lokal. Sedangkan untuk analisis data peran stakeholders dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat berdasarkan pendapat dari (Aribowo, 2019) yaitu peran *business* (bisnis), *government* (pemerintah), *community* (komunitas), *academic* (akademisi), dan *media* (publikasi) atau BGCAM yang dikenal dengan konsep *pentahelix*.

III. HASIL PEMBAHASAN

Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Objek Wisata Saba Budaya Suku Baduy Desa Kanekes

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat akan dilihat berdasarkan pandangan oleh Yaman, A.R. and Mohd, (2004) yang menetapkan 5 dimensi yaitu adanya dukungan dari Pemerintah, partisipasi dari masyarakat, pembagian keuntungan yang adil, penggunaan sumber daya lokal secara berkesinambungan, dan penguatan institusi lokal. Untuk memperoleh data analisis maka dilakukan observasi dan wawancara bersama para informan kunci untuk mendapatkan pernyataan realistis dari suatu aktivitas pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Objek Wisata Saba Budaya Suku Baduy Desa Kanekes Kabupaten Lebak.

1. Adanya Dukungan dari Pemerintah

Dukungan pemerintah terkait pemeliharaan sumber daya sebagai daya tarik wisata di objek wisata saba budaya suku Baduy Desa Kanekes masih terbilang rendah. Belum ada aturan khusus dari pemerintah setempat terkait bagaimana agar wisatawan yang datang tidak menggunakan dan membawa hal-hal yang berbau modern sehingga dapat menjaga kelestarian adat istiadat dan budaya setempat. Dengan banyaknya masyarakat Baduy yang kian terkontaminasi oleh budaya luar, seharusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini perlu dicatat bahwa banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Baduy karena mereka ingin lebih mengenal masyarakat Baduy dengan kehidupan yang masih tradisional, alam yang masih asri, adat istiadat dan budaya yang masih terpelihara karena memang itulah daya tarik wisata yang sesungguhnya di Baduy. Fungsi lain dari pemerintah juga terkait sebagai penasihat masyarakat, seharusnya pemerintah hadir terdepan dalam memberikan nasihat kepada masyarakat Baduy untuk tetap menjaga adat dan budaya mereka serta melakukan pendekatan kepada tetua-tetua di Baduy untuk memperketat aturan-aturan dan pemberlakuan sanksi untuk masyarakat yang melanggar.

Penyediaan fasilitas sebagai bentuk dukungan pemerintah juga masih tergolong rendah, fasilitas tempat pembuangan sampah seharusnya dipersiapkan oleh pemerintah dalam bentuk anggaran, karena memang masyarakat Baduy tidak menginginkan adanya alat-alat

modern termasuk tempat pembuangan sampah di Baduy, akan tetapi masyarakat Baduy bersedia bergotong royong untuk membuat tempat sampah dari bambu yang merupakan alat dasarnya adalah hasil alam yang dapat didukung oleh anggaran dari pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua pokdarwis sebagai informan kunci, beberapa tempat pembuangan sampah yang sudah terbuat di Baduy merupakan hasil bentuk gotong royong masyarakat Baduy dengan anggaran berasal dari swasta dan bukan dari pemerintah.

Pengevaluasian kinerja masyarakat yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendukung dan memastikan berjalannya pengembangan wisata saba budaya suku Baduy di Desa Kanekes juga masih terbilang rendah, karena pemerintah jarang melakukan evaluasi kinerja terhadap masyarakat dalam hal ini Pokdarwis yang ada di Desa Kanekes. Pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak seharusnya memiliki jadwal yang terencana serta target pencapaian atas kinerja masyarakat setiap tahunnya, hadir dalam memberikan masukan, dukungan untuk memperkuat keberadaan dan kinerja mereka sebagai pengelola, selalu mengadakan evaluasi kinerja setiap periodiknya untuk mengetahui pencapaian dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengembangan wisata di desa mereka. Masyarakat Baduy merupakan masyarakat yang tidak mengenal sekolah karena aturan adat yang tidak memperbolehkan, sehingga berdampak pada ketidakjelasan keberadaan Pokdarwis di Desa Kanekes ketika pendampingan jarang dilakukan oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah melakukan pendampingan yang lebih terhadap mereka serta terus melakukan komunikasi dan koordinasi agar masyarakat lebih semangat dalam mengelola wisata di desa mereka dan memperkuat keberadaan mereka sebagai pengelola wisata.

2. Partisipasi dari Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam penyediaan tempat sebagai pendukung wisata di desa mereka tergolong kuat, dalam pengelolaannya masyarakat bergotong royong untuk membangun berbagai keperluan seperti membuat tempat sampah, membuat jembatan Gajebo sebagai jembatan khas Baduy, membuat jembatan akar, dan pembuatan jalan yang sebagiannya menggunakan batu alam. Partisipasi masyarakat Baduy dalam membuka usaha pun tergolong kuat, karena memang untuk mencukupi kebutuhan mereka selain dari pertanian, berjualan adalah aktifitas mereka sejak dulu bahkan sebelum Baduy banyak dikunjungi oleh wisatawan. Dengan banyaknya pengunjung yang datang ke Baduy, masyarakat Baduy tidak hanya pergi ke *huma*, mereka juga banyak membuka warung-warung makanan dan minuman di depan rumah mereka, menjual madu, gula aren dan jahe gula merah hasil olahan sebagai kreatifitas mereka, buah-buahan hasil alam, kain tenun, koja, dan berbagai pernak-pernik lainnya sebagai oleh-oleh khas Baduy yang merupakan hasil dari kerajinan mereka. Jiiwa usaha dan keterampilan mereka terbentuk jauh sebelum Baduy menjadi tempat wisata saba Budaya yang banyak dikunjungi saat ini, sehingga ketika Baduy menjadi tempat wisata saba Budaya yang banyak dikunjungi mereka mampu untuk lebih kreatif. Saat ini mereka hanya butuh kehadiran pemerintah untuk lebih serius mendukung bagaimana agar penjualan mereka semakin meningkat, karena keterbatasan mereka dalam menjual produk-produk sehingga diperlukan

peran yang serius dari pemerintah untuk membantu meningkatkan penjualan hasil dari produk mereka. Berdasarkan informasi yang didapat, mereka mendapati kesulitan dalam memasarkan produk-produknya terutama dalam penjualan kain tenun khas Baduy. Menurutny bahwa masyarakat lokal di Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya lebih menyukai produk-produk luar, dan mereka membutuhkan dukungan dan fasilitas dari pemerintah untuk dapat memasarkan produk-produk mereka ke mancanegara.

Partisipasi masyarakat Baduy sebagai penerjemah masih tergolong rendah, karena bahasa sehari-hari yang mereka gunakan adalah bahasa sunda, selain itu memang masyarakat Baduy tidak ada yang bersekolah karena aturan adat yang melarangnya. Secara khusus tidak ada masyarakat yang menjadi penerjemah bahasa, dan tentu ini juga menjadi bagian terpenting yang harus dipikirkan oleh pemerintah agar masyarakat Baduy ke depan lebih banyak yang menguasai bahasa Indonesia. Di samping mereka adalah bangsa Indonesia yang sangat penting untuk memahami bahasa negaranya, tentu dalam pengelolaan pariwisata juga merupakan hal terpenting untuk menguasai bahasa Indonesia, karena pengunjung wisata saba Budaya suku Baduy tidak hanya berasal dari masyarakat sunda saja.

Partisipasi masyarakat sebagai agen wisata juga masih tergolong rendah, karena aturan yang dibutuhkan oleh masyarakat belum dibuat oleh Pemerintah Desa setempat. Agen wisata dalam hal ini adalah pemandu wisata. Masyarakat Baduy masih sedikit yang menjadi pemandu wisata, masyarakat Baduy harus bersaing terlebih dahulu dengan masyarakat luar Baduy yang menjadi pemandu wisata. Tentu hal ini menjadi persaingan yang tidak sebanding karena masyarakat Baduy dengan keterbatasannya dalam berkomunikasi, sedangkan masyarakat luar memiliki keahlian dalam berkomunikasi. Masyarakat Baduy lebih banyak menjadi *potter* untuk mengangkut barang-barang yang dibawa oleh pengunjung menuju rumah masyarakat Baduy yang dijadikan sebagai tempat menginap para wisatawan. Berdasarkan informasi yang didapat, masyarakat Baduy butuh adanya aturan yang melarang masyarakat luar menjadi pemandu, mereka sangat risih dengan keberadaan pemandu yang berasal dari luar Baduy selain menjadi pesaing yang tidak sebanding juga karena banyaknya para pemandu dari luar Baduy yang kurang mengetahui aturan adat yang ada di Baduy. termasuk dalam memberikan materi kebudayaan juga masih tergolong rendah, karena pemberi materi kebudayaan belum terbentuk dengan jelas dan hanya bermuara pada orang-orang tertentu. Tidak ada pemberian materi kebudayaan yang disampaikan secara khusus oleh masyarakat Baduy kepada setiap para pengunjung yang datang.

3. Pembagian Keuntungan yang Adil

Pembagian keuntungan pernah dilakukan oleh pemerintah sewaktu penarikan retribusi masih dilakukan oleh pemerintah daerah dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Baduy saat ini. Berdasarkan informasi yang didapat bahwa Pemerintah pernah menyalurkan anggaran untuk pembangunan jalan batu yang berada di Desa Kanekes, dan proses pembangunan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Baduy dalam rangka menjaga aturan adat yang ada di Baduy berdasarkan permintaan para tetua di Baduy. Pembangunan jalan yang bahan dasarnya merupakan batu alam diperbolehkan untuk dibangun

hanya di jalan penghubung antar kampung yang merupakan kawasan Baduy Luar, karena aturan adat melarang adanya pembangunan jalan batu di jalan penghubung antara kawasan Baduy Luar dengan Baduy Dalam demi menjaga kelestarian dan kealamian Baduy itu sendiri. Pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan infrastruktur lainnya karena berkaitan dengan adat setempat yang tidak memperbolehkan adanya pembangunan-pembangunan demi menjaga adat dan budaya serta kealamian dari Baduy itu sendiri. Selebihnya pemerintah hanya melakukan pembangunan infrastruktur di luar Baduy sebagai Kawasan Sekitar Penyangga (KSP) seperti Agrowisata Cikapek yang berada di jalur jalan baru menuju objek wisata saba budaya suku Baduy Desa Kanekes serta tempat parkir baru yang berlokasi di Desa Bojong Menteng dekat dengan terminal Ciboleger dengan sumber anggaran dari Pemerintah Provinsi Banten. Hal tersebut pula yang menjadikan dasar Pemerintah Kabupaten Lebak tidak lagi menarik retribusi dari kegiatan kepariwisataan di Baduy, terakhir tahun 2017.

4. Penggunaan Sumber Daya Lokal secara Berkesinambungan

Sumber daya alam di Baduy merupakan daya tarik wisata alam di objek wisata saba budaya suku Baduy Desa Kanekes, para pengunjung ke Baduy memang tujuannya selain wisata budaya juga wisata alam. Untuk itu pemerintah menyerahkan sepenuhnya pengelolaan wisata tersebut kepada masyarakat Baduy untuk dikelola sendiri seperti dalam membangun jalan dengan tetap menjaga kelestarian alamnya, jembatan yang merupakan alat dan bahannya terbuat dari hasil alam dan tradisional, termasuk rumah hunian dan lumbung padi yang semuanya terbuat dari bahan hasil alam dengan alat-alat yang tradisional. Pembangunan apapun yang merupakan daya tarik wisata di Baduy tanpa menggunakan alat-alat modern, jadi untuk penggunaan sumber daya alam di Baduy sudah baik. Adapun yang masih dibutuhkan penataan ke depan itu adalah penggunaan sumber daya lokal dalam hal kepeemanduan, karena masih banyak pemandu yang berasal dari luar masyarakat Baduy yang juga tanpa dasar pengetahuan akan Baduy itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya lokalnya masih rendah, meskipun begitu pemerintah sudah merencanakan untuk membuat aturan ke depan agar kepeemanduan di objek wisata saba budaya suku Baduy dilakukan oleh masyarakat Baduy itu sendiri.

5. Penguatan Institusi Lokal

Pembentukan organisasi lokal harus dimulai dari melalui persiapan, pemberian pelatihan dan menjamin kualitas sumber daya manusia. Dalam kenyataannya, penguatan institusi lokal di objek wisata saba budaya suku Baduy Desa Kanekes tergolong rendah. Institusi lokal dalam hal ini Pokdarwis di Baduy Desa Kanekes sudah tidak aktif. Berdasarkan informasi yang didapat, kurangnya pendampingan dan pelatihan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak membuat organisasi tersebut tidak berjalan. Seharusnya pemerintah berperan aktif dalam melakukan pendampingan bagi para pengelola khususnya di Baduy, karena melihat dari latar belakang pendidikan masyarakat di sana yang tidak bersekolah sehingga memiliki keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan kepariwisataan. Kegiatan pelatihan terkait pengelolaan kepariwisataan diselenggarakan hanya 1 kali dalam setahun dan sangat jarang dilakukan pendampingan.

Organisaasi kepariwisataan seperti Pokdarwis di Desa Kanekes dibutuhkan keterlibatan yang serius dari pemerintah daerah. Dukungan dari pemerintah sangat dibutuhkan berkaitan dengan ide, gagasan, alokasi anggaran untuk suport kegiatan penyuluhan yang di adakan oleh Pokdarwis, serta kerjasama untuk promosi produk yang akhirnya dapat menjadi semangat bagi mereka dalam menjalankan organisasi yang ada di tingkat lokal.

Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Objek Wisata Saba Budaya Suku Baduy Desa Kanekes

Peran *Stakeholders* dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat akan dilihat berdasarkan pandangan Aribowo, (2019) yang mengkategorikan ke dalam 5 kelompok, yaitu, Pemerintah, Komunitas, Bisnis, Akademisi, dan Media dengan melakukan observasi dan wawancara serta disiskusi dengan para informan kunci yang terkait dengan perannya dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Objek Wisata Saba Budaya Suku Baduy Desa Kanekes Kabupaten Lebak.

1. Pemerintah

Pemerintah dalam konteks perubahan sosial berperan sebagai *regulator* sekaligus *kontroler* yang memiliki peraturan dan tanggung jawab dalam perubahan sosial tersebut. Dalam hal ini, peran Pemerintah melibatkan semua jenis kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, promosi, alokasi keuangan, perizinan, pengembangan dan pengetahuan, kebijakan inovasi publik, dukungan untuk jaringan inovasi, dan kemitraan antara sektor publik dengan swasta. Pemerintah juga memiliki peran sebagai *koordinator* bagi para pemangku kepentingan yang berkontribusi pada perubahan sosial yang ingin dicapai oleh masyarakat.

Tugas dari pemerintah dalam setiap program pembangunan adalah sebagai fasilitator, koordinator dalam pelegalan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pelaksana atau penggerak pembangunan. Peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Objek Wisata Saba Budaya Suku Baduy Desa Kanekes yaitu dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh pariwisata masih tergolong rendah. Hal ini berdasarkan pada pengalokasian anggaran terkait dengan pengadaan sarana prasarana dan pembangunan infrastruktur lainnya dalam rangka pengembangan pariwisata tidak dianggarkan, kecuali untuk pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat sebagai pengelola pariwisata di Kabupaten Lebak secara keseluruhan. Tidak ada alokasi anggaran yang dikhususkan untuk kegiatan pelatihan dan penyuluhan bagi masyarakat Baduy dalam rangka pengembangan kapasitas masyarakat di sana, melihat latar belakang pendidikan masyarakat Baduy yang tidak bersekolah dirasa sangat perlu untuk diadakan pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan secara khusus.

Peran pemerintah dalam melakukan promosi terkait Baduy dan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat Baduy juga masih tergolong rendah, karena pemerintah lebih fokus terhadap promosi Baduy-nya saja dan hampir melupakan promosi produk yang dihasilkan oleh masyarakat sebagai bentuk kreatifitas mereka, artinya bahwa tidak ada keseimbangan dalam promosi yang dilakukan oleh pemerintah.

Peran pemerintah dalam membangun kemitraan dengan sektor lainnya pun masih tergolong rendah, karena pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak belum maksimal membangun kemitraan dengan sektor lainnya yang memiliki keterkaitan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Baduy. Pemerintah dalam hal ini Disbudpar Kabupaten Lebak menyadari bahwa untuk penyelenggaraan konteks pariwisata termasuk pariwisata di Baduy tidak dapat berdiri sendiri, dibutuhkan peran serta dari beberapa stakeholder yang lain seperti Komunitas, Pengusaha, Media, dan Akademisi dari Perguruan Tinggi di Kabupaten Lebak. Namun demikian, pemerintah baru hanya menjalin kerjasama secara maksimal dengan para Media yang ada di Kabupaten Lebak, Perguruan Tinggi yang berada di luar Kabupaten Lebak berdasarkan PKS. Seharusnya pemerintah terdepan dan maksimal membangun kemitraan dengan semua stakeholders dalam rangka upaya pengembangan pariwisata berbasis masyarakat tersebut, karena tidak akan ada keberhasilan yang maksimal tanpa adanya upaya dan kerjasama yang serius.

2. Komunitas

Pada konteks perubahan sosial, komunitas dapat berperan sebagai *akselerator*. Dalam hal ini komunitas merupakan orang-orang yang memiliki minat yang sama dan relevan dengan pengembangan potensi yang akan dikembangkan. Bertindak sebagai perantara atau menjadi penghubung antar pemangku kepentingan untuk membantu masyarakat dalam keseluruhan proses perubahan sosial dan memperlancar proses usahanya. Selain itu, komunitas juga memiliki peran untuk mempromosikan produk atau layanan yang diproduksi oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan objek wisata di Baduy sebenarnya sudah cukup tinggi, seperti gotong royong baik dalam kegiatan pembuatan sarana prasarana maupun dalam kegiatan usaha produk dan jasa. Akan tetapi penggerak kegiatan gotong royong dan kegiatan ekonomi tersebut bukanlah komunitas yang terbentuk dalam organisasi Pokdarwis, melainkan adalah tokoh masyarakat. Sedangkan Pokdarwis yang dibentuk oleh pemerintah yang anggotanya berasal dari masyarakat lokal secara organisasi sudah tidak aktif. Peran tokoh masyarakat sangat tinggi, terlihat dengan adanya hubungan yang baik antar tokoh masyarakat dengan perusahaan seperti BCA, BI, Krakatau, termasuk Agent Travel Sinar Mas Cilegon.

3. Bisnis/ Swasta

Bisnis atau juga dapat disebut sebagai sektor swasta pada konteks pengembangan pariwisata berbasis masyarakat ini dapat berperan sebagai *enabler*. Sektor swasta merupakan entitas yang melakukan proses bisnis dalam menciptakan nilai tambah dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, sektor swasta dapat berperan sebagai *enabler* di dalam menghadirkan infrastruktur teknologi, modal, dan berbagai fungsi lainnya yang berkaitan dengan pengembangan produk dan pemasaran dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat sebagai subjek perubahan sosial itu sendiri. Pada konteks bisnis dalam hal ini adalah pelaku UMKM di Desa Kanekes. Peran bisnis dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat sangat tinggi, mereka sering mengadakan penyuluhan dan pelatihan kerajinan kepada masyarakat sebagai pengrajin. Berdasarkan informasi terkait bahwa

kegiatan penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan oleh pebisnis di Baduy untuk pengrajin sangat penting dilakukan dalam rangka mengangkat Baduy mulai dari kerajinan tenun-nya. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan itu sering kali dilakukan dengan dana yang bersumber dari swasta seperti BI, BCA, dan Krakatau yang merupakan hasil dari kerjasama antar mereka. Dari hasil kerjasama tersebut, para pebisnis/ pelaku UMKM selain mendapatkan bantuan dana untuk kegiatan penyuluhan dan pelatihan, mereka juga mendapatkan bantuan berupa fasilitas *stand* ketika ada kegiatan-kegiatan pameran untuk mempromosikan produk seperti yang pernah dilakukan di Jakarta, Bandung, dan Surabaya termasuk bantuan pembuatan *boot* Karya Kreatif Indonesia.

Selanjutnya peran pebisnis/ pelaku UMKM di Baduy Desa Kanekes dalam penyediaan dana usaha kepada para pengrajin tergolong sangat rendah, karena tidak adanya dana usaha yang disediakan oleh pebisnis untuk para pengrajin di Baduy. Dana usaha yang dibutuhkan oleh pengrajin merupakan tanggungjawab masing-masing, untuk itu hal ini berpengaruh terhadap skema kerjasama yang dibangun. Skema kerjasama yang dibangun antar keduanya pun sangat sederhana, pengrajin memiliki kewajiban untuk mendapatkan modal dalam pengadaan bahan dan proses kerajinan, sedangkan pebisnis memiliki tanggungjawab dalam membangun jaringan, mempromosikan dan menjual produk dalam skala besar. Selain itu, skema kerjasama dalam pembayaran didasarkan pada saling percaya antar keduanya. Pebisnis tidak perlu membayar dimuka kepada pengrajin, pembayaran dilakukan setelah barang terjual dengan harga sesuai kesepakatan di awal.

4. Akademisi

Akademisi pada konteks perubahan sosial dapat berperan sebagai *konseptor*, melakukan penelitian dengan tujuan untuk membantu pengelola pariwisata berbasis masyarakat dalam hal identifikasi potensi daya tarik wisata dan peluang pengembangan usaha di wilayahnya. Akademisi juga dapat membantu di dalam meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan para pengelola pariwisata berbasis masyarakat. Dalam hal ini, akademisi merupakan sumber pengetahuan dari pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang mencakup konsep-konsep, teori-teori, dan model-model pengembangan terbaru serta relevan dengan kondisi potensi daya tarik wisata dan peluang usaha yang ada di Desa. Akademisi dalam hal ini adalah LPPM Universitas Setia Budi Rangkasbitung, dimana Universitas tersebut merupakan salah satu lembaga Pendidikan Tinggi yang berada di wilayah pengembangan objek wisata saba budaya suku Baduy Desa Kanekes. Peran akademisi sebagai peneliti dalam rangka tujuan membantu pengelola pariwisata berbasis masyarakat dalam hal identifikasi potensi daya tarik wisata dan peluang pengembangan usaha di wilayahnya masih tergolong rendah, karena belum adanya penelitian-penelitian yang dilakukan terkait dengan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Baduy. Kerjasama antara akademisi dengan pemerintah juga masih rendah, karena baik secara kelembagaan maupun secara program kerjasama terkait pengembangan wisata di Kabupaten Lebak khususnya di Baduy belum pernah dilakukan. Untuk dapat memaksimalkan usaha dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat termasuk objek wisata saba budaya suku Baduy di Desa Kanekes, perlu

adanya kerjasama antara kedua belah pihak yaitu Perguruan Tinggi sebagai pihak akademisi dengan Pemerintah, terutama Perguruan Tinggi yang berada di wilayah pengembangan tersebut, karena sudah tentu mereka lebih memahami wilayah dan daya tariknya ketimbang Perguruan Tinggi yang berada di luar wilayah pengembangan.

5. Media

Media dalam konteks pengembangan pariwisata berbasis masyarakat juga menjadi penting karena perannya sebagai *expenders*. Media berperan dalam mendukung publikasi dalam promosi produk dan layanan yang dihasilkan oleh masyarakat yang ingin melakukan perubahan sosial. Tidak hanya itu, media juga berfungsi untuk membangun *brand image* dari perubahan sosial tersebut. Sehingga orang lain dapat lebih mudah untuk mengakses informasi tentang perubahan sosial yang sedang dilakukan oleh masyarakat. Kemudahan akses informasi itulah yang kemudian menjadi salah satu faktor pendukung bagi datangnya para kolaborator baru yang bisa mendukung perubahan sosial yang sedang dilakukan oleh masyarakat. Peran media dalam mendukung publikasi terhadap promosi produk dan layanan yang dihasilkan oleh masyarakat yang ingin melakukan perubahan sosial masih rendah, karena publikasi yang dilakukan masih bersifat musiman dan hanya ketika sedang ada kegiatan seperti salah satunya kegiatan Seba Baduy. Sedangkan publikasi kegiatan seperti promosi Seba Baduy tidak termasuk kepada promosi produk dan layanan yang dihasilkan oleh masyarakat Baduy. Peran media bukan hanya sebatas untuk mempromosikan Baduy, masyarakat butuh dibantu dalam mempromosikan produk-produk yang dihasilkan oleh mereka termasuk layanan atas perubahan sosial yang mereka lakukan. Masyarakat Baduy kini sudah banyak yang membuat kerajinan-kerajinan seperti kain tenun dan tas koja, masyarakat Baduy juga sudah mulai banyak yang mengembangkan produk-produk olahan seperti gula aren dan bandrek, bahkan mereka sering kali memanen madu dari hutan mereka yang juga perlu untuk dibantu dalam promosi. Banyak masyarakat umum mengenal produk-produk mereka justru bukan karena peran media, melainkan karena mereka sendiri yang mempromosikan produk-produknya. Untuk itu sangat wajar ketika masyarakat Baduy saat ini banyak yang melanggar aturan yang tidak memperbolehkan menggunakan alat-alat modern seperti alat komunikasi berupa Handphone sekedar untuk melakukan komunikasi kepada rekan bisnis dan konsumen termasuk melakukan promosi melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Di satu sisi masyarakat umum termasuk para *stakeholders* memberikan penilaian tentang perubahan sosial budaya masyarakat Baduy yang kian menurun karena sudah terkontaminasi dengan hal-hal modern, tapi di sisi lain peran *stakeholders* tidak dimaksimalkan dan lemah dalam *action* terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat Baduy. Peran media harus lebih ditingkatkan bukan hanya sekedar mempromosikan Baduy, melainkan harus seimbang dengan promosi produk dan layanan yang dihasilkan dari masyarakat Baduy.

Rencana Tindak Lanjut Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Objek Wisata Saba Budaya Suku Baduy Desa Kanekes

Berkaitan dengan rencana tindak lanjut pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di objek wisata saba budaya suku Baduy Desa Kanekes sudah dibuat *master plan-*

nya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak bersama dengan Pemerintah Provinsi pada tahun 2019, rencana tindak lanjut tersebut berkaitan dengan pembangunan kawasan sekitar penyangga pariwisata dan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak sudah berkoordinasi dengan masyarakat sekitar objek wisata, bahwa untuk mengembangkan objek wisata saba budaya suku Baduy Desa Kanekes, maka Pemerintah perlu membangun kawasan sekitar penyangga-nya. Pada tahun 2024 ini pemerintah telah membangun kawasan sekitar penyangga yaitu berupa akses jalan baru menuju objek wisata saba budaya suku Baduy Desa Kanekes melalui jalan Kecamatan Kalanganyar hingga ke Kecamatan Leuwidamar. Dalam perencanaan tersebut, akan dibangun Agrowisata Cikampek di area jalan baru yang telah dibangun yang nantinya diperuntukkan sebagai rest area-nya wisatawan yang hendak berkunjung ke Baduy. Rencana pembangunan Agrowisata Cikampek sudah dimulai dengan pembebasan lahan tanah sekitar 52 hektar. Pada rest area tersebut juga akan dibangun masjid serta kios-kios bagi para UMKM. Kemudian Pemerintah juga sudah mulai membangun tempat parkir baru di Desa Bojongmenteng yang berdekatan dengan perbatasan Desa Kanekes, parkir tersebut diperuntukkan bagi kendaraan para pengunjung yang datang ke Baduy, sehingga ke depan setiap pengunjung tidak lagi parkir di terminal Ciboleger. Dalam rencana tindak lanjut yang sudah dibuat tersebut, pemerintah juga akan membangun kios-kios bagi para pelaku UMKM, toilet dan mushola sebagai fasilitas bagi para pengunjung, serta mengadakan untang-anting sebagai fasilitas ojek bagi para pengunjung dengan akses parkir baru – terminal Ciboleger sebagai pintu gerbang masuk ke Baduy Desa Kanekes. Berdasarkan informasi terkait, pembangunan infrastruktur dalam rangka rencana tindak lanjut pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Baduy Desa Kanekes hanya dapat menyentuh kawasan sekitar penyangga nya saja, karena untuk membangun infrastruktur di Baduy sangat bertentangan dengan aturan adat yang ada.

Rencana tindak lanjut pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Baduy berkaitan dengan upaya bagaimana tingkat kunjungan wisatawan yang datang ke Baduy semakin meningkat terutama wisatawan mancanegara. Secara aturan adat di Baduy, wisatawan mancanegara tidak diperbolehkan masuk ke kawasan Baduy Dalam dan hanya cukup sampai Baduy Luar saja. Tentu hal ini harus diciptakan solusi oleh pemerintah, karena disatu sisi adanya aturan adat tentang pembatasan kunjungan bagi wisatawan mancanegara ke Baduy Dalam, sedangkan disisi lainnya bahwa peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara merupakan ukuran keberhasilan bagi Pemerintah Daerah dalam pengembangan pariwisata. Berdasarkan informasi terkait rencana tindak lanjut pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut, pemerintah berencana membangun TIC (*Touris Information Center*) di Baduy. Pembangunan TIC ini diperuntukkan sebagai tempat pencatatan data bagi para wisatawan baik lokal, domestik, maupun mancanegara seperti nama, level umur, jenis kelamin, asal daerah / negara, maksud dan tujuan, serta lama tinggal agar terdata dengan baik dan secara aturan tersampaikan. TIC juga diharapkan dapat menjadi tempat bermuaranya para pengunjung yang hendak masuk ke Baduy seperti tempat tiket, tempat informasi, dan tempat berkumpulnya para

guide dan *potter*. Pemerintah berharap ke depan, wisatawan yang masuk sudah terdata dengan baik, tidak seperti sekarang ini yang hanya sebatas pencatatan tamu saja dan tidak detail kaitanya dengan wisatawan khususnya wisatawan mancanegara. Hal tersebut merupakan langkah yang akan diambil oleh pemerintah dan sudah masuk pada perencanaan pemerintah ke depan, sehingga proses inventarisasi terhadap wisatawan dapat menjadi dasar diizinkannya para wisatawan mancanegara masuk ke Baduy Dalam, karena daya tarik yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi dari wisata saba budaya suku Baduy itu sendiri adalah selain perjalanan wisata alam baduy juga perkampungan Baduy Dalam.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari analisis yang cukup komprehensif, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di objek wisata saba budaya suku Baduy Desa Kanekes Kabupaten Lebak dapat dikatakan tergolong rendah. Hal ini didasarkan pada :
 - a. Rendahnya dukungan pemerintah dalam pemeliharaan sumber daya, penasehat masyarakat, penyediaan fasilitas, dan pengevaluasian kinerja masyarakat.
 - b. Rendahnya partisipasi masyarakat sebagai penerjemah, agen wisata, dan pemberi materi kebudayaan. Hal yang sudah baik yaitu partisipasi masyarakat dalam gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam berdagang.
 - c. Rendahnya penggunaan sumber daya lokal. Dibutuhkan aturan kepemanduan yang jelas dan berpihak pada masyarakat local. Adapun penggunaan SDA sudah baik karena adanya aturan adat setempat.
 - d. Rendahnya penguatan institusi lokal, hal ini terlihat dari Pokdarwis yang sudah tidak aktif di Baduy.
 - e. Adapun pembagian keuntungan yang adil tergolong baik, hal ini karena sudah ada kegiatan pembangunan infrastruktur di kawasan sekitar penyangga meskipun tidak ada penarikan retribusi dari kegiatan pariwisata di Baduy.
2. Peran *stakeholders* yang terdiri atas pemerintah, komunitas, swasta, akademisi, dan media dapat dikatakan belum optimal. Hal ini didasarkan pada belum terlihatnya pengembangan pariwisata yang merupakan inisiatif masyarakat dan didukung oleh dana investor dengan skema yang jelas, dan peran pemerintah sebagai fasilitator sekaligus koordinator. Peraturan pendukung, anggaran, kerjasama dengan akademi lokal, promosi produk, belum disiapkan secara serius untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.
3. Rencana tindak lanjut pengembangan pariwisata berbasis masyarakat terfokus kepada pembangunan infrastruktur di kawasan sekitar penyangga pariwisata. Rencana tindak lanjut tersebut belum menyentuh pada pembuatan peraturan pendukung, peningkatan pelatihan kapasitas masyarakat, dan dukungan anggaran terhadap pembangunan infrastruktur di kawasan objek wisata.

Saran

Berikut adalah saran yang terkait dengan kesimpulan penelitian ini :

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat suku Baduy melalui pelatihan dan pendampingan yang khusus, memperketat aturan adat berikut sanksi, serta menyiapkan peraturan pendukung agen wisata terutama dalam kependamuan.
2. Mengevaluasi dan meningkatkan peran para *stakeholders* terutama pemerintah; membangun koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan para stakeholders lainnya; merancang peraturan yang mendukung pengembangan pariwisata berbasis masyarakat terutama yang terkait dengan pendataan wisatawan dan kependamuan; mengalokasikan anggaran yang cukup memadai untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat; memfasilitasi berbagai kegiatan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat terutama dalam promosi produk yang dihasilkan oleh masyarakat.
3. Mengevaluasi *master plan* yang telah disusun agar tidak hanya terfokus kepada pembangunan infrastruktur di kawasan sekitar penyangga, merancang peraturan pendukung yang dibutuhkan masyarakat sekitar pariwisata, dan merancang tahapan pelatihan serta pendampingan agar terencana, terfokus, dan intens untuk memastikan terjadinya pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aribowo, H., Wirapraja, A., & Putra, Y. D. (2019). Implementasi Kolaborasi Model Pentahelix Pariwisata Di Jawa Timur Serta Meningkatkan Perekonomian Domestik. *Jurnal Mebis*, 31–38.
- Asker, S., Boronyak, L., Carrard, N., and Paddon, M., (2010). *Effective Community JUMPA Volume 2 Nomor 2 Januari 2016*
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, *Profil Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal di Provinsi Banten (Kajian Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)*, (Dinas LHK Prov. Banten, 2017), h. 4-5.
- Djoewisno MS, *Potret Kehidupan Masyarakat Baduy*, (Serang: Cipta Pratama ADV. Pt, 1987)
- Damanik, J., 2013, *Pariwisata Indonesia Antara Peluang Dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dewi, Made Heny Urmila, 20014, “Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Tabanan, Bali”, Disertasi, Yogyakarta : Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada
- Hausler, Nicole & Strasdas, Wolfgang , 2003, *Training Manual for Community-Based Tourism*. Zschortau

Kurnia & Sihabudin. (2010). Saatnya Baduy bicara. Jakarta: PT. Bumi Aksara and Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten.

Moleong (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Cetakan Ke Tiga Puluh Enam). Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA.

Ika Sartika. Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. Penelitian Mandiri : Institut Pemerintahan Dalam Negeri. (2017)

Suansri, Potjana, 2003, Community Based Tourism Hand Book , Thailand : Rest Project

Yaman, A.R. and Mohd, A. (2004). Community-based ecotourism: a new proposition for sustainable development and environmental conservation in Malaysia. *Journal of Applied Sciences*, 4(4), 583–589.

Sumber Lain

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2031

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

Surat Keputusan Camat Leuwidamar Nomor 556.4/305.kec/XII/2005 Tentang Pemberian Wewenang Desa Kanekes Dalam Pengelolaan Pariwisata

Peraturan Desa Kanekes Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Saba Budaya dan Perlindungan Masyarakat Adat Tatar Kanekes (Baduy)